

Model Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) pada Tata Kelola Pembangunan Daerah di Provinsi Papua

Christine M Wakarmamu

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

**Corresponding author*

E-mail: keinarra76@gmail.com*

Article History:

Received: Dec, 2025

Revised: Dec, 2025

Accepted: Dec, 2025

Abstract: *Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memastikan keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam seluruh siklus pembangunan daerah. Di Provinsi Papua, implementasi GEDSI memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik sosial budaya, geografis, serta konteks Otonomi Khusus. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung implementasi GEDSI melalui model pendampingan perguruan tinggi dalam tata kelola pembangunan daerah. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif dan kolaboratif, dengan dosen berperan sebagai unsur perguruan tinggi yang tergabung dalam Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Papua. Pendampingan dilakukan melalui fasilitasi diskusi kebijakan, konsultasi teknis, penguatan kelembagaan, serta pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan GEDSI Provinsi Papua Tahun 2024. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan perguruan tinggi berkontribusi pada peningkatan pemahaman aparatur terhadap GEDSI, penguatan integrasi GEDSI dalam tata kelola pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas substansi Laporan Penyelenggaraan GEDSI. Model pendampingan ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan inklusif, khususnya di wilayah otonomi khusus.*

Keywords:

Pengabdian Kepada Masyarakat, GEDSI, Pengarusutamaan Gender, Inklusi Sosial, Perguruan Tinggi, Papua

Pendahuluan

Perlindungan menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. GEDSI bertujuan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan lainnya (Bappenas, 2021; UN Women, 2015).

Dalam konteks Provinsi Papua, implementasi GEDSI memiliki arti strategis mengingat kompleksitas sosial budaya, kondisi geografis, serta kerangka Otonomi Khusus. Pembangunan daerah Papua tidak hanya dituntut efektif secara ekonomi, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak dasar dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (World Bank, 2012).

Pemerintah Provinsi Papua telah menunjukkan komitmen terhadap implementasi GEDSI melalui pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan GEDSI Tahun 2024. Namun, implementasi GEDSI dalam tata kelola pembangunan daerah masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pemahaman aparat, integrasi dalam perencanaan dan penganggaran, serta koordinasi lintas perangkat daerah (Kementerian Dalam Negeri RI, 2011; Pemerintah Provinsi Papua, 2019).

Dalam konteks tersebut, keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan kapasitas aparat, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya integrasi gender dalam kebijakan dan regulasi daerah (Jannah et al., 2025; Girsang et al., 2025; Larasati & Zahidi, 2025). Perguruan tinggi memiliki peran dalam menyediakan pendekatan berbasis evidensi, penguatan kapasitas aparat, serta pendampingan kebijakan yang berkelanjutan (Connell, 2012; UNDP, 2018). Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model pendampingan perguruan tinggi dalam implementasi GEDSI pada tata kelola pembangunan daerah Provinsi Papua.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan partisipatif dan kolaboratif. Dosen berperan sebagai unsur perguruan tinggi yang secara resmi tergabung dalam Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Papua Tahun 2024 (Pemerintah Provinsi Papua, 2024).

Pendampingan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, meliputi fasilitasi diskusi kebijakan lintas perangkat daerah, konsultasi teknis terkait integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran, penguatan kelembagaan GEDSI, serta pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan GEDSI Provinsi Papua Tahun 2024. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama antara aparaturnya pemerintah daerah dan perguruan tinggi

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan perguruan tinggi memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman aparaturnya pemerintah daerah terhadap konsep dan strategi GEDSI. Temuan ini menguatkan hasil-hasil kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa tanpa pendampingan dan penguatan kapasitas, implementasi PUG di tingkat daerah cenderung berjalan normatif dan administratif (Jannah et al., 2025; Girsang et al., 2025). Aparatur mulai memaknai GEDSI sebagai pendekatan lintas sektor dalam tata kelola pembangunan daerah, bukan sekadar program sektoral (Bappenas, 2021; UN Women, 2015).



Gambar 1. Proses Pendampingan Implementasi GEDSI bersama Perangkat Daerah Provinsi Papua

Pendampingan juga berkontribusi pada penguatan integrasi GEDSI dalam tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran. Berbeda dengan praktik di tingkat kelurahan atau komunitas yang umumnya berskala mikro dan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam kegiatan berbasis mahasiswa di Kelurahan Klojen (Putri et al., 2025), pendampingan pada tingkat provinsi menuntut pendekatan kebijakan, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks. Hal ini tercermin dalam peningkatan kualitas substansi Laporan Penyelenggaraan GEDSI Provinsi

Papua Tahun 2024, yang memuat analisis kelembagaan, peran perangkat daerah, serta tantangan implementasi GEDSI secara lebih komprehensif (Pemerintah Provinsi Papua, 2025).



Gambar 2. Fasilitasi diskusi dan pendampingan teknis oleh dosen sebagai unsur perguruan tinggi dalam Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Papua.

Dari perspektif akademik, model pendampingan ini memperkuat pendekatan evidence-based policy dan tata kelola pembangunan yang inklusif. Keterlibatan perguruan tinggi memungkinkan integrasi antara konsep teoritis dan praktik kebijakan, sehingga implementasi GEDSI menjadi lebih kontekstual dan berkelanjutan (World Bank, 2012; Connell, 2012; UNDP, 2018).

Kesimpulan

Model pendampingan perguruan tinggi dalam implementasi GEDSI di Provinsi Papua terbukti memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola pembangunan daerah yang berkeadilan dan inklusif. Keterlibatan dosen sebagai unsur perguruan tinggi dalam Tim Teknis Pengarusutamaan Gender berperan penting dalam meningkatkan pemahaman aparatur, kualitas dokumen kebijakan, serta integrasi GEDSI dalam pembangunan daerah. Model ini dapat direplikasi pada konteks daerah lain dengan karakteristik serupa.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua, serta Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Papua atas kerja sama dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Daftar Referensi

- Bappenas. (2021). *Roadmap pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (GEDSI) dalam pembangunan nasional*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Connell, R. (2012). Gender, health and theory: Conceptualizing the issue, in local and world perspective. *Social Science & Medicine*, 74(11), 1675–1683.
- Nova Chalimah Girsang, , R. P., & Eet Saeful Hidayat. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BANJAR. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 79–84. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4694>
- Jannah, I., & Marzaniar, P. (2025). Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan Stuktural Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 20(1), 1-26.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*.
- Larasati, M. A., & Zahidi, M. S. . (2025). Upaya Penegakan Gender di Kota Malang melalui Pembentukan “Raperda Pengarusutamaan Gender Kota Malang” dalam Rapat Harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jatim. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1575-1582. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6594>
- Pengarusutamaan Gender Di Kelurahan Klojen Melalui Pemberdayaan: Bincang Santai Mahasiswa HKn FIS Universitas Negeri Malang SDGs. (2025). *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 4(3), 255-259. <https://www.jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/43>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2019). *Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Papua*.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2024). *Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Papua Tahun 2024*.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2025). *Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) Provinsi Papua Tahun 2024*.
- Sawir, M., Anirwan, A., Abubakar, F., Kamaluddin, S., Ondikeleuw, M., & Pongtuluran, R. (2023). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2),

42-53.

UNDP. (2018). *Gender equality strategy 2018–2021*. United Nations Development Programme.

UN Women. (2015). *Gender mainstreaming in development programming: Guidance note*.

World Bank. (2012). *World development report 2012: Gender equality and development*.